

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Sukarno, Muhadar, Maskun, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta

Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Asy'ari, Syukri, et.all, 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta

Chazawi, Adami, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta

Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Utama Pustaka, Yogyakarta

Marpaung, Leden, 2000, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm. 241.

- Petanase, Syarifuddin, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta
- Poernomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta
- Rhiti, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Siahaan, Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Ciawi – Bogor
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* UI-Press, Jakarta
- Suseno, Frans Magnis, 1993, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta

B. Karya Ilmiah

- Hildebrandt, Mireille, 2010, “The Meaning and The Mining of Legal Texts”, *Makalah*, The Computational Turn in the Humanities, Swansea University
- Pompe, Sebastian, 2010, *Tulisan A.W. Joengbloed mengenai Judicial Liability, Presentasi*, Diskusi Judicial Liability yang Diselenggarakan Komisi Yudisial RI-NLRP, Jakarta, 12 Mei 2010.
- Sutiyoso, Bambang, 2010, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 2

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5199)

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 : Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Yang Tetap

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 beserta Surat Edaran tanggal 23 Oktober 1969 Nomor 18 Tahun 1969.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana

Surat Nomor 02/Pid.PK/2015/PN.Slmm perihal Penolakan Atas Peninjauan Kembali Kedua Mary Jane Fiesta Veloso

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

D. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 17/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Februari 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 6 Maret 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 16/PUU-VII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Desember 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 64/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Februari 2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429K/Pid/2010 perihal Kasasi perkara Antasari Azhar, S.H., M.H., tanggal 21 September 2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pid/2011 perihal Peninjauan Kembali perkara Antasari Azhar, S.H., M.H., tanggal 13 Februari 2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996 Peninjauan Kembali perkara Mochtar Pakpahan, tanggal 25 Oktober 1996.

Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 48/Pid.B/2008/PN JMB perihal perkara Imam Chambali als. Kemat, tanggal 8 Mei 2008.

Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 49/Pid.B/2008/PN JMB perihal perkara Devid Eko Priyanto, 8 Mei 2008.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 2/KTS/Bks/1977 perihal perkara Sengkon bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep bin Salam, tanggal 20 Oktober 1977

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 38/1978/Pid/PTB perihal perkara Sengkon bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep bin Salam, tanggal 25 Mei 1978

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 6/1980/Pi/PNBKS perihal perkara Gunel bin Kuru, Siih bin Siin, Warnita bin Jaam, tanggal 15 Oktober 1980

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 7/1980/Pid/PNBKS perihal perkara Elli bin H. Senam, Nyamang bin Naing, Jabing bin H. Paih, tanggal 13 November 1980.

E. Website

Ingki Rinaldi, “Mary Jane Masih Punya Peluang Ajukan PK”,
<http://print.kompas.com/baca/2015/04/29/Mary-Jane-Masih-Punya-Peluang-Ajukan-PK>, diakses 15 Mei 2015.

Aghnia Adzkia, “Ketua MA Tuding PK Berulang Jadi Dalih Tunda Eksekusi Mati”,
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150107142245-12-22961/ketua-ma-tuding-pk-berulang-jadi-dalih-tunda-eksekusi-mati/>, diakses 2 Mei 2015.